

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Buku:

Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika

Amirudin, Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-9. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*. Jakarta: Sumber Ilmu Hukum

Harahap, M Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karya Ilmiah:

Wulandari, Oktavia, M. Sabaruddin Sinapoy dan Kamaruddin Jafar, “Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol.2 Issue.3 Desember 2020, Kendari: Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Wahyuningrum, Kartika S, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”, *Jurnal Refleksi Ilmu Hukum Tahun 2020*, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Peters, Anne, “Corruption as a Violation of International Human Rights”, *The European Journal of International Law*, Vol 29 No.4 Tahun 2019, Italy: Oxford University Press

Muttaqin, Labib, Muhammad Edy Susanto, “Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya”, *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, Vol.4 No.1, Juni 2018, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

Saragih, Yasmirah Mandasari, Teguh Prasetya dan Jawade Hafidz, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 05 No.1 Januari 2018, Kuningan: Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Waluyo, Bambang, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol 1 No.2 Tahun 2014, Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Ridwan, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.64 Desember 2014, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Sugiarto, Totok, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 18 No.1 Tahun 2013, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Merdeka

Soseco, Thomas, “Corruption Pattern In Indonesia: A Geographical Analysis”, Journal of Economics and Policy, 2012, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Myint, U, “Corruption: Causes, Consequences And Cures”, Asia-Pacific Development Journal, Tahun 2000

Sumber Lainnya:

KPK, “Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia”, <https://www.kpk.go.id/id/berita>, diakses pada tanggal 15 November 2020

Dwi Bowo Raharjo, “Enam Provinsi di Indonesia dengan tingkat Korupsi Tertinggi”, <https://jateng.suara.com/read/2019/04/10/212117/kpk-sebut-enam-provinsi-di-indonesia-ini-juara-korupsi?>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

KPK, “Statistik Penindakan oleh KPK”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, diakses pada 15 Oktober 2020

Mas Alamil Huda, “Rencana KPK Membangun Kantor Cabang di Daerah Provinsi” <https://nasional.republika.co.id>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020